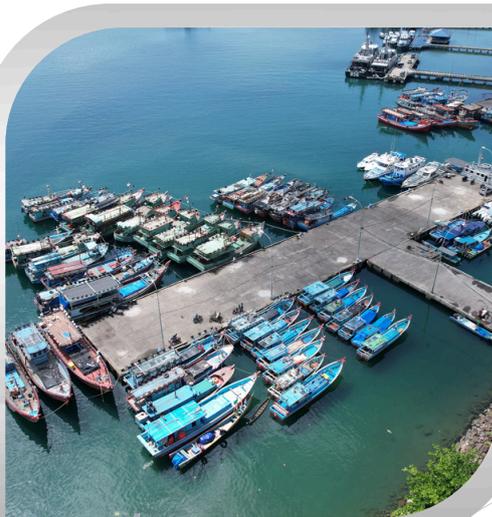




# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2024



## Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT  
TELEPON/FAX: (0751) 751122 EMAIL: [pps\\_bungus@yahoo.com](mailto:pps_bungus@yahoo.com)

#2024  
KKP BEYOND

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

djpt  
bersinergi

PPS BUNGUS  
**RANCAK**  
Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen

## KATA PENGANTAR



**Widodo, S.Pi, M.Sc**  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Samudera Bungus

Puji dan syukur Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan I Tahun 2024" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik keberhasilannya maupun hal-hal lain yang harus dilakukan peninjauan kembali agar dapat mencapai keberhasilan, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai media pertanggung jawaban, laporan ini berisikan tentang Rencana Strategis tahun 2024, Rencana Kinerja tahun 2024, dan Capaian Kinerja 2024. Seluruh hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dituangkan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kami akan terus berupaya menyempurnakan sistem AKIP dan penyajian Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

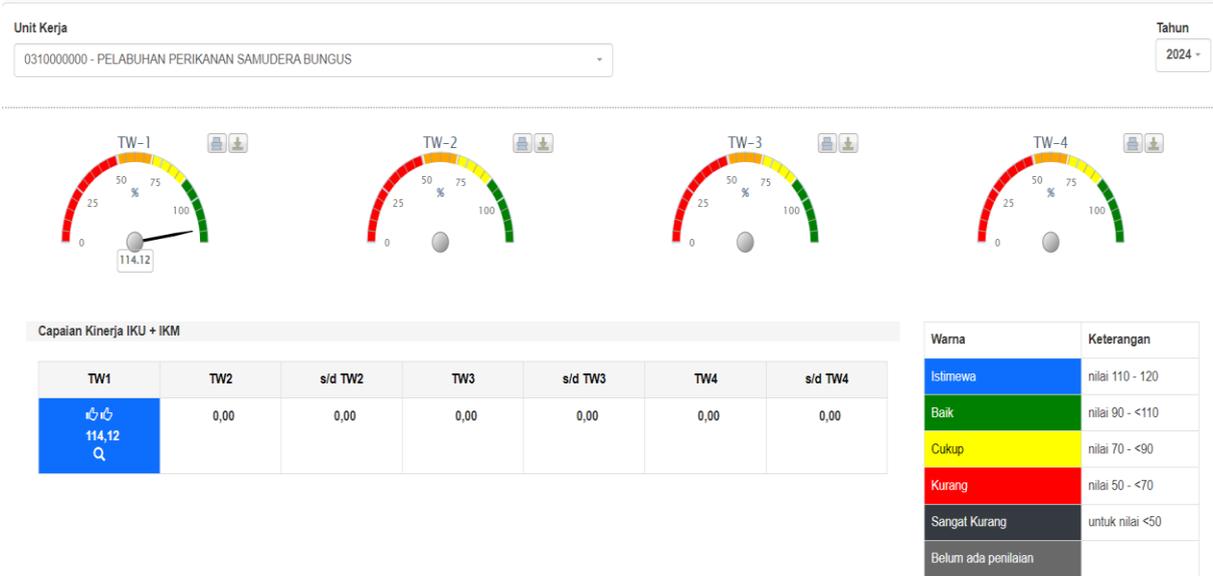
Demikianlah laporan ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

**Bungus, 26 April 2024**  
**Kepala Pelabuhan Perikanan**  
**Samudera Bungus**



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 14.949.757.000,- untuk Tahun 2024 dimana yang terealisasi sebesar Rp. 3.084.675.195,- dengan persentase sebesar 20,63% sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 114.12%.



Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I PPS Bungus

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus Triwulan I tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target Triwulan I tahun 2024 yang mencapai angka lebih atau diatas 100% di semua Indikator Kinerja yang ditargetkan (Indikator Kinerja Triwulan I tahun 2024 Terlampir).

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian Output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan I tahun 2024 dapat disajikan pada diagram diatas, berdasarkan Dashboard Peta Strategis s/d triwulan I pada Aplikasi Kinerja: [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
LAMPIRAN .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.    LATAR BELAKANG .....	2
1.2.    TUGAS DAN FUNGSI .....	3
1.3.    STRUKTUR ORGANISASI .....	4
1.4.    SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>6</b>
2.1.    VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP .....	7
2.2.    TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	8
2.2.1. <i>Stakeholder Perspective</i> .....	8
2.2.2. <i>Customer Perspective (Output)</i> .....	9
2.2.3. <i>Internal Process Perspective (Process)</i> .....	9
2.2.4. <i>Learning and Growth Perspective (Input)</i> .....	9
2.3.    RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2024.....	11
2.4.    PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2024 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>14</b>
3.1.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	15
3.2.    ANALISA CAPAIAN KINERJA.....	17
3.3.    AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
4.1.    KESIMPULAN .....	41
4.2.    STRATEGI PEMECAH MASALAH .....	42
Lampiran .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I PPS Bungus .....	ii
Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2024.....	4
Gambar 3. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024.....	8
Gambar 4. Penerimaan PNBP TW 1 Tahun 2024.....	18
Gambar 5. Capaian Volume Produksi Tahun 2024.....	20
Gambar 6. Capaian Tingkat Kinerja PPS Bungus Tahun 2024 .....	23
Gambar 7. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN Triwulan I tahun 2024.....	27
Gambar 8. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah.....	28
Gambar 9. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) .....	41

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 .....	10
Tabel 2.	Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024	11
Tabel 3.	Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC).....	12
Tabel 4.	Capaian IKU PPS Bungus hasil Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2024 .....	15
Tabel 5.	Target dan Realisasi Nilai PNBPN di PPS Bungus .....	17
Tabel 6.	Capaian Penerima PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus .	18
Tabel 7.	Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2024.....	19
Tabel 8.	Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus.....	20
Tabel 9.	Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus .....	21
Tabel 10.	Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus .....	23
Tabel 11.	Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	24
Tabel 12.	Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus .....	25
Tabel 13.	Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	26
Tabel 14.	Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan .....	28
Tabel 15.	Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan .....	29
Tabel 16.	Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan .....	30
Tabel 17.	Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2024.....	31
Tabel 18.	Capaian Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	32
Tabel 19.	Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	34
Tabel 20.	Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus .....	35
Tabel 21.	Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	36
Tabel 22.	Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	37
Tabel 23.	Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	37
Tabel 24.	Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera .....	38
Tabel 25.	Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2024.....	39



**PPS BUNGUS**  
**RANCAK**  
Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen

# BAB 1

## PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terletak di Jl. Raya Padang-Painan KM. 16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mempunyai visi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan, 2) Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah (*Value Added*) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan, 3) Meningkatkan Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan Update. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Rencana Starategis yang telah disusun, selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada Renstra tersebut, dibuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, maka disusunlah dokumen Perencanaan Kinerja (RENJA) yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan setiap tahun anggaran. RENJA tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akunTabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindaklanjut pelaksanaan ditahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mencakup hal tersebut diatas, pada tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RENSTRA 2020-2024. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja PPS Bungus secara bertahap dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Triwulan 1 tahun 2024 ini akan menginformasikan keberhasilan dalam pencapaian indikator selama Triwulan 1 tahun 2024 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2024 dan Perjanjian Kinerja.

## 1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

### Fungsi Pemerintahan

- 1) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- 3) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 5) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- 6) Pelaksanaan kesyahbandaran;
- 7) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- 8) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- 9) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- 10) Pemantauan wilayah pesisir;
- 11) Pengendalian lingkungan;
- 12) Kepabeanan; dan/atau
- 13) Keimigrasian.

### Fungsi Perusahaan

- 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- 2) Pelayanan bongkar muat ikan;
- 3) Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- 4) Pemasaran dan distribusi ikan;
- 5) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 6) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- 7) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 8) Wisata bahari; dan/atau;
- 9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2024

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

#### Subbagian Umum

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata

laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPS Bungus dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan dengan transparan serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus TRIwulan I tahun 2024 akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2024 yang telah ditargetkan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Dari analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja yang ada bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2024 sebagai berikut :

## **Ringkasan Eksekutif**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## **Bab I Pendahuluan**

Pada bab Pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **Bab III Akuntabilitas**

### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **b. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **Bab IV Penutup**

Bab Penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **Lampiran**

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Kepala Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.



**PPS BUNGUS**  
**RANCAK**  
Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Program memiliki peran strategis, yakni sebagai: (I) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (II) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (III) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (IV) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (V) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: *“Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan.
2. Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
4. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.
5. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan kegiatan kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

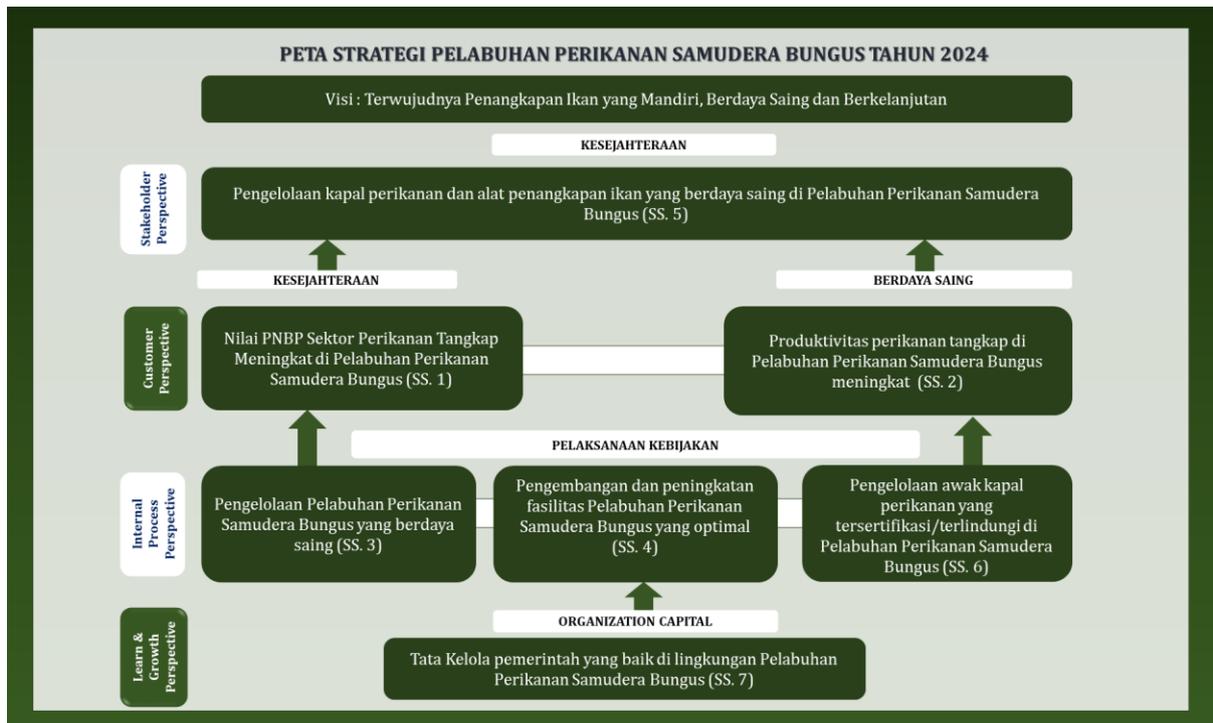
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan.

Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. PPS Bungus perlu menerapkan strategi guna mengimplementasikan tujuan pembangunan perikanan tangkap tersebut, dengan menetapkan Sasaran Strategis yang dapat dipergunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.



Gambar 3. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan bagian dari Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerjanya berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Adapun Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang terbagi dalam 4 (tiga) perspektif, yaitu:

### 2.2.1. Stakeholder Perspective

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam *stakeholder perspective* adalah Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan.

### **2.2.2. Customer Perspective (Output)**

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam *Customer Perspective* adalah:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

### **2.2.3. Internal Process Perspective (Process)**

Sasaran strategis yang termasuk kedalam *Internal Process Perspective* adalah:

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi.
  - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
  - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
2. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
  - b. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
3. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja: Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan.

### **2.2.4. Learning and Growth Perspective (Input)**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* di PPS Bungus. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat satu sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu adanya Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan.
- b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- c. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- d. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- h. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Informasi cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I Kepada Bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI	POLA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	1.283,2	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Pelayanan Usaha
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	6.347	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (Persen).	100	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Pelayanan Usaha
	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	84	Triwulan	Rata-Rata	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	81	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	57	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	30,10	Triwulan	Rata-Rata	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal).	412	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen).	30,15	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	75	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
7. Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	94	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84	Semesteran	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93,76	Semesteran	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,30	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis diatas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengamanatkan satu program utama yang menaungi seluruh kegiatan perikanan tangkap, yakni “Pengelolaan Perikanan Tangkap”. Dari Program utama tersebut telah dijabarkan kembali ke dalam 5 (lima) Kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat penangkapan Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap;

### 2.3. RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2024

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya, guna pencapaian sasaran yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Rencana kinerja tahunan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran 2024 (Rp.)
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>			<b>2.037.121.000,-</b>
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	Terselenggaranya Tata Kelola pemanfaatan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing dan berkelanjutan	38.000.000,-
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang profesional dan partisipatif	1.882.200.000,-

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran 2024 (Rp.)
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu	4.000.000,-
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDI secara berkelanjutan	112.921.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>12.912.636.000,-</b>
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Terkelolanya anggaran pembangunan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus secara efisien dan akuntabel	12.912.636.000,-

## 2.4. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2024

Penetapan Kinerja yang telah disusun oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan serta Sasaran Strategis yang telah disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis (SS) dikelompokkan kedalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Bungus pada tahun 2024, untuk semua sasaran strategis berjumlah 7 SS dan 18 IKU. Sasaran strategis ini merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi PPS Bungus. Sasaran strategis ini berfungsi untuk memudahkan PPS Bungus untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya dalam rangka menyukseskan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh PPS Bungus sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 yang disusun pada awal tahun 2024 berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) PPS Bungus, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 yang mengacu kepada *Balanced Scorecard* (BSC)

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	1.283,2
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	6.347
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (Persen). Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	100 84

		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	81
		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	57
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal).	412
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen).	30,15
		Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	75
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80
		Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	94
		Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80
		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93,76
		Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,30



**PPS BUNGUS**  
**RANCAK**  
Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen

# **BAB 3**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan beralihnya pengelolaan kinerja KKP, yang telah mengimplementasikan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), PPS Bungus dalam hal ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perikanan Tangkap ikut serta dalam melaksanakan Visi, Misi, dan Tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen Perikanan Tangkap dengan melaksanakan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan oleh DJPT maupun yang ditetapkan sendiri oleh PPS Bungus.

Tabel 4. Capaian IKU PPS Bungus hasil *Balanced Scorecard* (BSC) Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	% CAPAIAN	
		TAHUNAN	TW I	TW I		
1. Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1. Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	1.283,2	400	603,87	150,97%
	2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	6.347	1.550	1.853,01	119,55%
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (Persen).		100	-	-	-
	4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).		84	84	84,58	100,69%
	5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).		81	-	-	-
4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).		57	-	-	-
	7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).		30,10	30,10	78,93	262,23%
5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal).		412	382	434	113,61%
6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen).		30,15	-	-	-
7. Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	10. Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)		75	-	-	-

11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	80	100	133,33%
12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	94	-	-	-
13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84	-	-	-
14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	-	-	-
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	-	-	-
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93,76	-	-	-
17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86	-	-	-
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,30	88,30	89,83	101,73%

Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja triwulan berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
5. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

## 3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan 1 Tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

### Sasaran Kinerja (SK) 1: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Indikator Nilai PNBP PPS Bungus adalah seluruh penerimaan PPS Bungus yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan PPS Bungus sebagai unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP PPS Bungus didasarkan pada PP Nomor 75 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Ada dua jenis penerimaan di PPS Bungus, yakni penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan fungsional di PPS Bungus, yaitu: Pelayanan Penggunaan tanah dan bangunan, tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan perikanan, pelayanan penggunaan peralatan dan mesin, pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan, pelayanan penggunaan peralatan pengolahan, pelayanan penggunaan transportasi, pelayanan tambat untuk kapal perikanan, pelayanan tambat untuk kepala non perikanan, pelayanan docking dengan perkerjaan, pelayanan perbaikan kapal, pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel pelayanan pas masuk harian, pelayanan pas masuk berlangganan, pelayanan kebersihan di kawasan pelabuhan, pelayanan kebersihan kolam pelabuhan, dan pendapat jasa lainnya.

### Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus

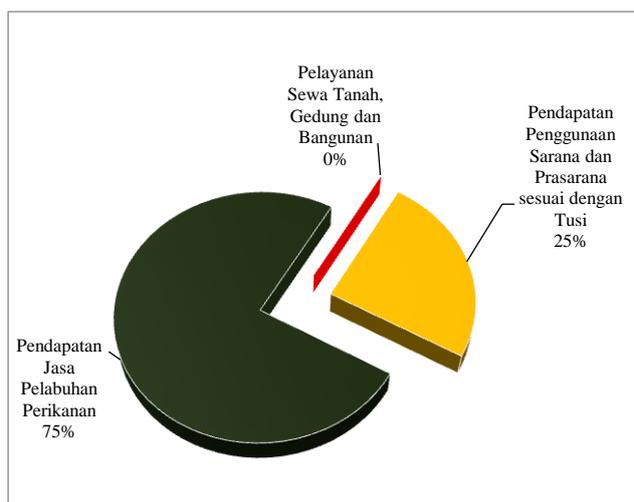
#### Target dan Realisasi

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 5. Target dan Realisasi Nilai PNBP di PPS Bungus

Anggaran	Jenis Jasa	Target 2024 (Rp.)	Realisasi Triwulan I (Rp.)
425131	<b>Pelayanan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan</b>	-	-
425151	<b>Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi</b>	<b>317.175.000</b>	<b>150.033.466</b>
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan	115.650.000	21.785.315
	Tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan Perikanan	41.450.000	3.480.000
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	140.300.000	122.618.151
	Pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan	7.500.000	900.000
	Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan	10.400.000	-
	Pelayanan Penggunaan Transportasi	1.875.000	1.250.000

Anggaran	Jenis Jasa	Target 2024 (Rp.)	Realisasi Triwulan I (Rp.)
<b>425621</b>	<b>Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan</b>	<b>966.029.000</b>	<b>453.834.286</b>
	Pelayanan tambat untuk Kapal Perikanan	136.479.000	20.780.445
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Non Perikanan	476.600.000	145.250.211
	Pelayanan Docking dengan Pekerja	68.000.000	31.685.200
	Pelayanan Perbaikan Kapal	55.400.000	43.337.000
	Pelayanan Pengadaan Air	31.000.000	67.620.000
	Pelayanan Bengkel	1.800.000	560.000
	Pelayanan Pas Masuk Harian	70.000.000	10.817.000
	Pelayanan Pas Masuk Berlangganan	28.500.000	9.900.000
	Pelayanan Kebersihan di Kawasan Pelabuhan	7.650.000	3.983.756
	Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan	62.000.000	15.998.550
	Pendapatan Jasa Lainnya	28.600.000	103.902.124
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>		<b>1.283.204.000</b>	<b>603.867.752</b>



Gambar 4. Penerimaan PNBPNP TW 1 Tahun 2024

Realisasi PNBPNP paling besar pada Triwulan I tahun 2024 berasal dari akun pendapatan jasa pelabuhan Perikanan dengan penerimaan terbanyak dari pelayanan tambat untuk kapal non perikanan sebesar Rp. 145.250.211,- (24,1%) dari total penerimaan triwulan I tahun 2024. Sedangkan realisasi dari akun pendapatan penggunaan sarana dan prasarana, penerimaan terbanyak berasal dari Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 122.618.151,- atau sebesar 20,3% dari total penerimaan tahun 2024.

Tabel 6. Capaian Penerima PNBPNP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 1 Nilai PNBPNP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 1 Penerimaan PNBPNP Non SDA di PPS Bungus								
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1.283,2	603,87	47,06%	400	603,87	150,97%	-	-	-

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa capaian penerimaan PNBPNP Non SDA di PPS Bungus sampai dengan akhir Triwulan I sudah mencapai 47,06% dari target tahunan dengan jumlah penerimaan sebesar 603,87 (Rp. Juta). Namun Capaian penerimaan PNBPNP Non SDA Triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2023 karena pada tahun 2023 IKU Penerimaan PNBPNP Non SDA di PPS Bungus dihitung pada Triwulan IV.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian Penerimaan PNBP Non SDA Triwulan I tahun 2024 di PPS Bungus didukung oleh komitmen dari petugas pelayanan jasa dan penagihan atas jasa pelayanan kepada stakeholder. Terlaksananya kegiatan pelayanan cold storage, docking, tambat labuh dan jasa listrik dengan maksimal menjadi penunjang capaian PNBP TW 1 tahun 2024 di PPS Bungus.

Upaya pencapaian realisasi PNBP Triwulan I tahun 2024 di PPS Bungus masih menemukan permasalahan yaitu masih kurangnya pemahaman stakeholder terkait tata cara pembayaran dengan mekanisme non tunai, meskipun telah dilakukan sosialisasi terkait cara menggunakan pembayaran non tunai. Selain itu, masih ditemukan layanan yang belum bisa dimaksimalkan, seperti pelayanan jasa air yang selama ini hanya mengandalkan air bukit di pelabuhan sehingga ketika musim kemarau debit air berkurang, maka pelabuhan akan kesulitan dalam menyediakan air.

## Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan IKU ini adalah Pendampingan dan Supervisi Operasional

## Sasaran Kinerja (SK) 2: Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat

Sasaran kinerja kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah “Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

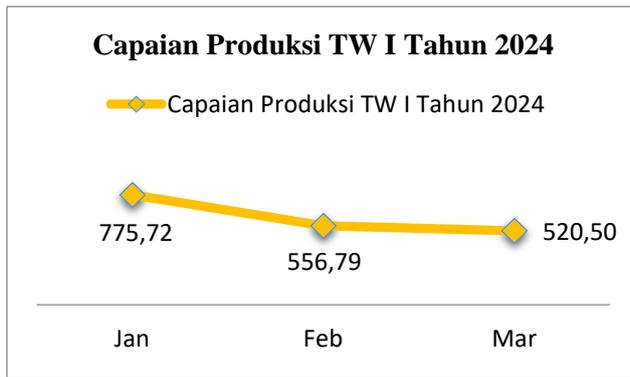
## Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPS Bungus. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Pendataan di Pelabuhan Perikanan. Pendataan dilaksanakan oleh petugas pendataan terhadap produksi ikan yang didaratkan dengan menggunakan form monitoring data produksi harian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi, selanjutnya diolah oleh petugas pengelola data, serta dilaporkan secara berkala, baik harian, bulanan, dan triwulanan sebagai bentuk realisasi produksi perikanan tangkap.

## Target dan Realisasi

Tabel 7. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2024

No	Bulan	Volume Jumlah Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
1	Januari	775,72	7.068.189.000
2	Februari	556,79	5.736.793.000
3	Maret	520,50	5.638.154.000
<b>Total</b>		<b>1.853,01</b>	<b>18.443.136.000</b>



Berdasarkan gambar disamping dapat terlihat bahwa capaian volume produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I tahun 2024 cenderung mengalami tren penurunan setiap bulannya. Capaian volume produksi paling besar adalah pada bulan Januari sebesar 775,72 Ton, dengan nilai produksi sebesar Rp. 7.068.189.000,-

Gambar 5 Capaian Volume Produksi Tahun 2024

Tabel 8. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

SK 2 Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat								
IK 2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
6.347	1.853,01	29,20%	1.550	1.853,01	119,55%	1.440	2.158,7	149,9 %

Jika dibandingkan dengan capain pada periode yang sama tahun sebelumnya (2023), dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi sebesar 30,35% volume produksi di PPS Bungus. Jika dilihat dari target yang ditetapkan, dapat diketahui bahwa target volume produksi juga terus meningkat sebesar  $\pm 5\%$  dari target tahun sebelumnya dan capaian volume produksi di PPS Bungus selalu diatas 100%.

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi volume produksi di PPS Bungus didukung adanya sinergi dan kolaborasi antara Kelompok Kerja Kesyahbandaran dan Kelompok Kerja Operasional yang saling bekerja sama, serta upaya aktif petugas pendataan ikan dalam melakukan pemantauan lapangan dan dermaga secara berkelanjutan dan konsisten. Petugas pendataan juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas bongkar dengan tujuan mencatat hasil dan nilai produksi secara akurat.

Dalam upaya pencapaian realisasi volume produksi di PPS Bungus pada Triwulan I tahun 2024 terdapat hambatan yang sifatnya diluar kendali, yakni faktor cuaca. Selain itu pada Triwulan I tahun 2024 hasil tangkapan di PPS Bungus tidak berada dalam nilai optimal disebabkan oleh faktor musim ikan khususnya dari kelompok ikan pelagis besar sehingga kapal perikanan dengan API Pancing Ulur Tuna mengurangi aktivitas penangkapan selama Triwulan I 2024.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator volume produksi pada Triwulan I tahun 2024 adalah :

- Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- Pelaksanaan Pendataan Produksi Perikanan Untuk menunjang PNPB Pasca Produksi.

### Sasaran Kinerja (SK) 3: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing

Sasaran kinerja keenam (SK-3) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

#### Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan.

Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan.

#### Target dan Realisasi

Indikator Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi merupakan perhitungan dari usulan pengusahaan baik baru ataupun perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di PPS Bungus. Realisasi indikator ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9 Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing							
	Target	Capaian	%	Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya	
Target				Capaian	%	Target	Capaian	%
IK 3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)							
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
100	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada triwulan I ini, terdapat empat pengguna yang mengajukan usulan pengusahaan di PPS Bungus. Setiap permohonan yang masuk telah melalui proses analisis dan evaluasi yang komprehensif. Meskipun demikian, realisasi capaian indikator persentase permohonan pengusahaan yang telah dianalisis dan/atau dievaluasi belum dapat dihitung untuk triwulan ini karena metode perhitungan yang digunakan adalah metode tahunan. Hal ini berarti bahwa data yang relevan untuk indikator tersebut hanya dapat diperoleh dan dianalisis setelah satu tahun penuh.

Selain itu, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 karena indikator persentase permohonan pengusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi baru mulai diterapkan pada triwulan IV tahun 2023. Oleh karena itu, tidak ada data historis yang tersedia untuk perbandingan pada periode sebelumnya. Dengan demikian, perbandingan capaian indikator hanya akan mungkin dilakukan setelah ada data yang memadai dari penerapan indikator ini.

## **Analisa Keberhasilan dan Kegagalan**

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di PPS Bungus meliputi tindak lanjut yang dilakukan terhadap setiap permohonan perusahaan yang masuk. Selain itu, tingginya ketersediaan peluang investasi di PPS Bungus serta ketersediaan lahan yang signifikan untuk pengolahan dan perusahaan lebih lanjut di dalam pelabuhan turut berkontribusi pada pencapaian ini.

Namun, terdapat tantangan terkait dengan banyaknya lahan dan bangunan yang masih kosong yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini di masa depan. Untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan minat para pemangku kepentingan, tim pelayanan usaha aktif memberikan informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi rutin. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengukur indeks kepuasan konsumen dan menyampaikan informasi terbaru, termasuk perubahan, keluhan, maupun saran perbaikan. Sosialisasi yang intensif ini diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat dan memaksimalkan penggunaan lahan serta bangunan yang tersedia.

## **Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi adalah pelaksanaan tata kelola serta operasional perusahaan di pelabuhan perikanan. Pelaksanaan tata kelola yang baik melibatkan penerapan prosedur yang jelas dan efisien, sehingga setiap permohonan perusahaan dapat dianalisis dan dievaluasi dengan tepat waktu dan akurat. Selain itu, operasional perusahaan yang efektif memastikan bahwa semua aspek perusahaan di pelabuhan berjalan dengan lancar, termasuk koordinasi antara berbagai pihak terkait, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan kinerja secara berkala. Kedua aspek ini “tata kelola dan operasional” saling mendukung untuk memastikan bahwa setiap permohonan perusahaan yang masuk mendapatkan perhatian yang diperlukan dan diproses sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat mencapai target kinerja yang diharapkan .

## **Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

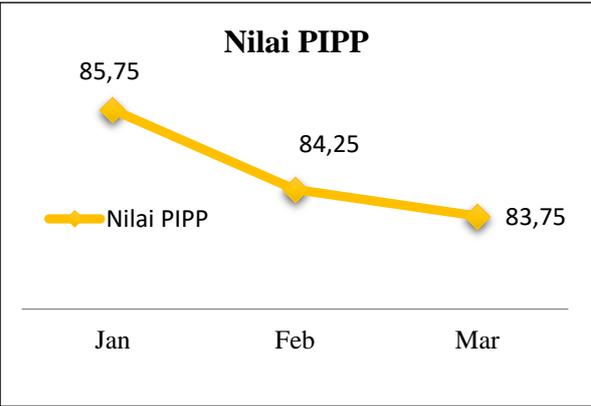
IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan penilaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No 20/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

IKU ini juga merupakan nilai atas capaian tingkat operasional laporan yang mendukung kegiatan-kegiatan operasional UPT PPS Bungus berupa pengumpulan data, informasi, publikasi, dan kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang di nilai setiap bulan dari eselon I DJPT (EVKIN) yang meliputi 27 jenis kriteria yaitu: Frekuensi Pengiriman Data (PIPP), ELogbook, Aplikasi SPB-online, SHTI, Realisasi Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pelabuhan, Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan, Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan, Panjang Dermaga, Kedalaman Kolam, Sarana Perbaikan (Docking,

bengkel), Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan, Ketersediaan Lahan Pelabuhan, Pelayanan Tambat Labuh, Produksi Perikanan, Frekuensi Kunjungan Kapal, STBLKK, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis, Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi, Pelaksanaan K5, Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan), Penyaluran Es (kapal), Penyaluran BBM (kapal), Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP, Pemanfaatan Lahan Pelabuhan, Penyerapan Tenaga Kerja, Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan.

**Target dan Realisasi**

Pada gambar disamping terlihat fluktuasi capaian nilai kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selama Triwulan I tahun 2024 dengan range nilai 81-87. Nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan realisasi 87,25 dengan kategori sangat baik. Hal ini didukung dengan nilai frekuensi pengiriman data yang optimal. Sementara nilai terrendah pada bulan Desember dengan nilai 81,5 dengan kategori baik. Penurunan nilai kinerja pelabuhan pada bulan Desember disebabkan oleh tidak adanya pelayanan SHTI sehingga terjadi penurunan nilai.



Gambar 6 Capaian Tingkat Kinerja PPS Bungus Tahun 2024

Tabel 10. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

<b>SK 3</b>	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing</b>							
<b>IK 4</b>	<b>Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus</b>							
<b>Tahunan 2024</b>			<b>Triwulan I (Tahun 2024)</b>			<b>Triwulan I Tahun Sebelumnya</b>		
<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
84	84,58	100,69%	84	84,58	100,69%	83	84,42	101,71

Capaian Indikator Kinerja (IK) 4: Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada triwulan I tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan baik untuk triwulan maupun tahunan dengan persentase 100,69%. Hal ini menunjukkan bahwa operasional pelabuhan berhasil dijalankan secara efektif dan efisien pada awal tahun 2024. Namun, jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2023, terdapat penurunan sebesar 1,02% dalam capaian triwulan I tahun 2024.

**Analisa Keberhasilan dan Kegagalan**

Keberhasilan realisasi indikator tingkat kinerja pelabuhan didukung oleh kedisiplinan tim penginput dalam melakukan penginputan data setiap bulannya, serta adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh pimpinan. Hal ini juga didukung dengan pembagian tugas penginputan dan monitoring yang dilakukan oleh setiap petugas dalam setiap tim kerja di OPK, TKPU, dan TU.

Dalam upaya pencapaian realisasi indikator ini masih ditemukan permasalahan berupa kriteria frekuensi pengiriman data di aplikasi PIPP yang masih belum maksimal sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan agar mencapai nilai maksimal. Namun tetap telah

dilaksanakan sinergitas dalam penginputan sehingga dapat tetap tercapai meski belum maksimal.

**Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU tingkat operasional pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dalam hal pengelolaan dan operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).

**Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator yang menunjukkan :

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (SPB), yaitu jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan, yaitu jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan, yaitu jumlah permintaan verifikasi SHTI dibagi dengan jumlah SHTI yang diterbitkan.

**Target dan Realisasi**

Tabel 11 Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

<b>SK 3</b>		<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing</b>						
<b>IK 5</b>		<b>Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus</b>						
<b>Tahunan 2024</b>			<b>Triwulan I (Tahun 2024)</b>			<b>Triwulan I Tahun Sebelumnya</b>		
<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
81	-	-	-	-	-	-	-	-

Realisasi capaian Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum dapat dilakukan perhitungan pada triwulan ini, sebab metode perhitungannya adalah tahunan. Indikator ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, sebab indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator baru pada triwulan IV tahun 2023.

**Analisa Keberhasilan dan Kegagalan**

Keberhasilan capaian indikator tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di dukung dengan kinerja tim kesyahbandaran dalam menghimbau para pemilik ataupun pengurus kapal perikanan yang akan melakukan docking di kolam pelabuhan untuk mengurus dan melengkapi surat perizinan dengan lengkap. Realisasi ini juga didukung dengan adanya kesadaran pemilik kapal dalam mengajukan permohonan SPB, STBLK kedatangan kapal dan SHTI yang semakin meningkat.

Sementara dalam upaya pencapaian realisasi indikator ini, yang menjadi penghambat keberhasilan adalah masih ada kapal-kapal di kolam pelabuhan yang akan Docking namun belum memiliki dokumen yang lengkap.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

### Sasaran Kinerja (SK) 4: Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal

Sasaran kinerja kelima (SS-4) yang akan dicapai adalah “Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

### Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dihitung dengan membandingkan jumlah pengembangan Fasilitas PPS Bungus dengan masterplan/draft perubahan masterplan PPS Bungus.

### Target dan Realisasi

Tabel 12 Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal								
	IK 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya			
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
57	-	-	-	-	-	-	-	-	

Realisasi capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum dapat dilakukan perhitungan pada triwulan ini, sebab metode perhitungannya adalah tahunan. Indikator ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, sebab indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator baru pada triwulan IV tahun 2023.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor pendukung keberhasilan realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pelaksanaan pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan samudera Bungus yang telah sesuai dengan masterplan yang telah di riviui pada tahun 2022.

Faktor yang dapat menjadi penghambat keberhasilan indikator ini adalah masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur. Meskipun adanya permasalahan dalam upaya pencapaiannya, PPS Bungus telah berupaya mengoptimalkan kegiatan pengembangan fasilitas dengan kondisi anggaran yang tersedia.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur.

## Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

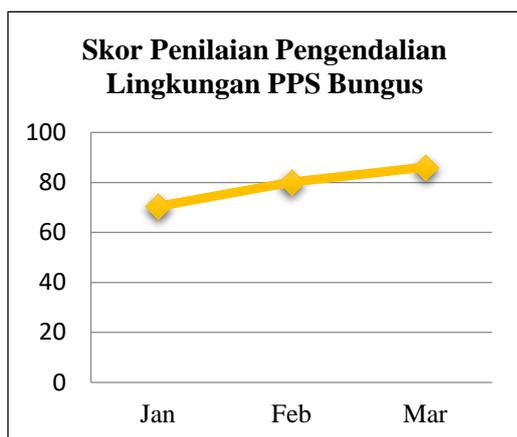
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

## Target dan Realisasi

Tabel 13 Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 4		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal						
IK 7		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
30,10	78,93	262,23	30,10	78,93	262,23	-	-	-



Gambar 7. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN Triwulan I tahun 2024

Capaian indikator kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selama triwulan I berada dalam kategori **baik** dengan skor kumulatif 236.79 dan rata-rata 78.93. Sehingga apabila dibandingkan dengan target triwulan maupun tahunan, capaian triwulan I sudah melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tidak dapat dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023, sebab indikator kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Bungus Merupakan indikator yang baru muncul pada triwulan IV tahun 2023.

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Tercapainya keberhasilan capaian IK 7 didukung dengan adanya evaluasi menyeluruh. Semula belum adanya tim kerja untuk mendukung penginputan pada palikasi SELARASKAN menjadi terbentuk tim kerja yang mewakili masing-masing evidence dalam pengisian aplikasi. Masing-masing personal pada tim kerja memenuhi isian untuk program mandatory, program evidence, dan menginput hasil pada aplikasi SELARASKAN, sehingga pada triwulan IV telah terjadi perbaikan dan nilainya bisa mencapai target.

Kondisi yang menjadi penghambat dalam pencapaian IK 7 adalah nilai yang sangat fluktuatif yang dipengaruhi oleh kriteria dan data dukung dalam aplikasi, sehingga kedepannya perlu disesuaikan dan dievaluasi kembali agar tim yang terbentuk benar-benar tim yang dapat mewakili masing-masing data dukung pada setiap kriteria yang ada.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian adalah pelaksanaan layanan dukungan Aplikasi SELARASKAN.

### Sasaran Kinerja (SK) 5: Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja kelima (SK-5) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

### Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

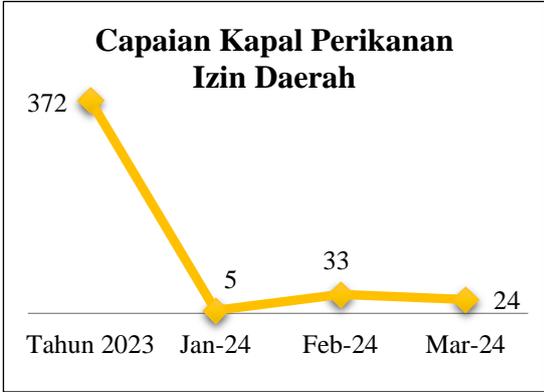
Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan, perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

Indikator kinerja Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan merupakan jumlah dokumen kapal perikanan oleh PPS Bungus dengan formula perhitungan yaitu nilai posisi akhir jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan.

**Target dan Realisasi**

Tabel 14 Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

<b>SK 5</b>	<b>Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus</b>							
<b>IK 8</b>	<b>Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan</b>							
<b>Tahunan 2024</b>			<b>Triwulan I (Tahun 2024)</b>			<b>Triwulan I Tahun Sebelumnya</b>		
<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
412	434	105,34%	382	434	113,61	-	-	-



Gambar 8. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah

Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebanyak 434 atau 105,34% dari target tahunan dan 113,61% dari target triwulan I tahun 2024. Sementara untuk perbandingan triwulan I tahun 2023 tidak dapat dilakukan sebab metode perhitungan pada tahun 2023 adalah tahunan. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melayani penerbitan SKKP untuk dua Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.

**Analisa Keberhasilan dan Kegagalan**

Faktor pendukung tercapainya keberhasilan IK 8 antara lain 1) tingginya antusiasme pemilik kapal perikanan dalam melaporkan pengajuan pemeriksaan kaol perikanan, sehingga realisasi untuk indikator ini tercapai dengan baik; 2) adanya dukungan anggaran yang cukup memadai terkait dengan pelaksanaan penerbitan SKKP sehingga pelaksanaan pengecekan dan pemeriksaan kapal perikanan dapat optimal.

**Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, yaitu adanya pelaksanaan implementasi kebijakan bidang kapal perikanan. Implementasi tersebut berupa pemeriksaan kelaikan, pengukuran, pengujian, dan inspeksi kapal perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan yang akan diterbitkan dokumennya memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan.

**Sasaran Kinerja (SK) 6: Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus**

Sasaran Kinerja keenam (SK-6) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

## Indikator Kinerja (IK) 9 – Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha subsektor penangkapan ikan dan usaha subsektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel. Untuk elemen fisik, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. Pemenuhan aspek kelaikan elemen fisik kapal perikanan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kegiatan operasional Kapal Perikanan. Sementara untuk elemen personel, kapal perikanan harus memenuhi aspek kelaikan pengawakan kapal perikanan, baik dari segi kesejahteraan, kompetensi, disiplin, maupun penempatan/susunan jabatan awak kapal perikanan di Kapal Perikanan. Hal ini dimaksud untuk menjamin dan memastikan keselamatan pelayanan, perlindungan kerja bagi Awak kapal Perikanan, serta keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Kegiatan pemenuhan kompetensi kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan bagi awak kapal perikanan, selain dilaksanakan melalui diklat, dapat juga dilaksanakan melalui bimbingan teknis dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Pasal 146 sampai dengan pasal 149. Pada tahun 2024 pelaksanaan IK Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Metode penghitungan IK 9 dengan membandingkan jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-Pkl/PKL dan sudah tersertifikasi dibagi jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL/PKL.

### Target dan Realisasi

Tabel 15 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

Target dan Realisasi								
SK 6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan							
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
30,15	-	-	-	-	-	-	-	-

Metode perhitungan indikator ini adalah tahunan, sehingga belum dapat dilakukan perhitungan pada triwulan I. Indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor yang mendukung capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan antara lain adalah: 1) adanya kesadaran para awak kapal perikanan dan pemilik kapal perikanan dalam meningkatkan kompetensi, perlindungan (asuransi jiwa) dan melaksanakan PKL yang sudah meningkat; 2) terus melaksanakan sosialisasi dan pendekatan secara langsung kepada awak kapal perikanan dan pemilik kapal perikanan agar selalu meningkatkan kompetensi awak kapal, perlindungan (asuransi jiwa) untuk awak kapal dan melaksanakan PKL.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan adalah Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan.

## Sasaran Kinerja (SK) 7: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kinerja ketujuh (SK-7) yang akan dicapai adalah “Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan pelabuhan perikanan samudera bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

## Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis, predikat ini merupakan hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Unit kerja yang mendapatkan predikat WBK harus memenuhi sebagian besar kriteria tersebut, termasuk manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## Target dan Realisasi

Tabel 16 Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
IK 10		Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan						
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
75	-	-	-	-	-	-	-	-

Hasil rekapitulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2024 belum menunjukkan capaian, karena perhitungan indikator ini dilakukan secara tahunan atau pada Triwulan 4 tahun 2024.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dari kegiatan ini didukung dengan, 1) terlaksananya asistensi WBK yang dilakukan bersama dengan tim ortala DJPT, sehingga diperoleh hasil penilaian mandiri bersama tim asistensi; 2) adanya sinergitas antara seluruh bagian dalam upaya pelaksanaan kegiatan dan pelengkapan seluruh dokumen sesuai ketentuan; 3) adanya tim yang bekerja dengan efektif dan sesuai SOP yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh tim asistensi dari Ortala DJPT dapat terselesaikan dengan baik. Saat ini yang menjadi kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah masih belum adanya inovasi yang dapat diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah adanya kegiatan persiapan penetapan zona integritas menuju WBK serta pelaksanaan evaluasi dan penetapan organisasi di Lingkungan KKP. Kegiatan persiapan penetapan zona integritas dilaksanakan dalam pada kegiatan pemenuhan dokumen WBK, penguatan komitmen bersama pembangunan zona integritas PPS Bungus. Serta adanya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Zona Integritas.

## Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, reuiu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2023 s.d. triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

## Target dan Realisasi

Tabel 17 Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2024

SK 7	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
	IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
80	100	125	80	100	125	75	100	133,3

Hasil rekapitulasi laporan hasil pengawasan sd Triwulan 1 Tahun 2024 dari Inspektorat Jenderal KKP Lingkup DJPT menunjukkan bahwa tidak terdapat temuan/rekomendasi pada Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2024 Inspektorat Jenderal KKP Lingkup DJPT. Sehingga capaian indikator ini dianggap 100 (persen) atau 125% dari target tahunan dan triwulanan. Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023, realisasinya adalah 100

(persen). Namun secara persentase terdapat penurunan sebesar 8,3% disebabkan oleh target tahun 2023 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2024.

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan IK 11 adalah dengan 1) membentuk tim kerja guna dapat melakukan BAP terhadap stakeholder yang belum melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan; 2) membentuk tim inventarisasi BMN guna melakukan inventarisasi dan mengetahui BMN yang sudah dilakukan sensus dan belum; dan 3) tim yang bekerja dengan efektif dan sesuai SOP yang telah ditetapkan sehingga sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dapat terselesaikan dengan baik.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian ini adalah dengan pembentukan tim-tim bersinergi dan adanya pemenuhan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan adalah kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

### Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan turunan dari Indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan merupakan penilaian Kementerian PAN & RB atas akuntabilitas kinerja KKP. Rekonsiliasi kinerja adalah proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pengelola kinerja, menjadi sasaran bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja, serta sebagai sarana pendampingan untuk mengawal SAKIP yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sarana/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Terdapat 4 (empat) aspek penilaian rekonsiliasi kinerja, yakni aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (bobot 20%). Nilai rekonsiliasi kinerja PPS Bungus diukur dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di PPS bungus yang di hitung menggunakan kertas kerja rekonsiliasi yang sesuai ketentuan.

### Target dan Realisasi

Tabel 18 Capaian Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
94	-	-	-	-	-	-	-	-

Rekapitulasi capaian untuk Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum tersedia pada Triwulan I ini. Hal ini disebabkan oleh metode perhitungan indikator kinerja yang bersifat tahunan dan baru akan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2024. Dengan demikian, penilaian terhadap capaian kinerja ini hanya dapat dilakukan setelah seluruh data tahunan terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh pada akhir tahun. Hal ini memastikan bahwa evaluasi kinerja yang dilakukan adalah akurat dan mencerminkan kondisi operasional selama satu tahun penuh.

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor keberhasilan IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah 1) adanya sinergi antara tim pengelola AKIP dalam melakukan pelaporan kinerja dan pemantauan kinerja, sehingga tercapai aspek kepatuhan pelaporan, kesesuaian aspek antara data dan informasi yang dilaporkan, serta tercapainya target yang telah ditetapkan; 2) Adanya kegiatan perencanaan, pelaksanaan kinerja; dan 3) pelaporan AKIP yang dilaksanakan oleh tim pengelola kinerja secara bersinergi dengan tim teknis pelabuhan.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IK 12 adalah Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

### Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- 1) **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- 2) **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
- 3) **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- 4) **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi

hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

### Target dan Realisasi

Tabel 19 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

<b>SK 7</b>	<b>Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus</b>							
<b>IK 13</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus</b>							
<b>Tahunan 2024</b>			<b>Triwulan I (Tahun 2024)</b>			<b>Triwulan I Tahun Sebelumnya</b>		
<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
84	-	-	-	-	-	-	-	-

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk Triwulan I tahun 2024 belum bisa dilaksanakan karena metode perhitungan untuk indikator kinerja ini adalah semesteran, dan akan dilakukan pada triwulan II (Semester 1) dan Triwulan IV (Semester 2).

### Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Beberapa usaha yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah dengan: 1) memberikan kesempatan ASN untuk menempatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Webinar/Seminar/Workshop /Magang/Sejenis; 2) memberikan himbauan dari bagian kepegawaian terkait pengembangan kompetensi pegawai, khususnya himbauan bagi pegawai yang belum mencapai 20 JP; 3) partisipasi aktif dari seluruh pegawai untuk mengikuti diklat/seminar/pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai.

### Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah perencanaan, pengembangan dan pembinaan Disiplin Pegawai. Selain itu kegiatan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui seminar, diklat, maupun bimbingan teknis baik secara online maupun *offline*.

### Indikator Kinerja (IK) 14 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%).
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

## Target dan Realisasi

Tabel 20 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
80	-	-	-	-	-	-	-	-

Perhitungan dan rekapitulasi capaian untuk indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena metode perhitungan untuk indikator kinerja ini bersifat tahunan dan perhitungan tersebut akan dilaksanakan pada akhir Triwulan IV.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa (PBJ) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, serta dilengkapi dengan dokumen pengadaan yang lengkap dan sesuai standar yang ditentukan.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian adalah dengan adanya honorium pejabat pengadaan barang/Jasa guna pelaksanaan kegiatan (PBJ) yang dilakukan oleh pejabat pengadaan.

## Indikator Kinerja (IK) 15 – Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Unit Eselon I yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2022 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

## Target dan Realisasi

Tabel 21 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
IK 15		Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
80	-	-	-	-	-	-	-	-

Perhitungan dan rekapitulasi capaian untuk indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena metode perhitungan untuk indikator kinerja ini bersifat tahunan dan perhitungan tersebut akan dilaksanakan pada akhir Triwulan IV.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pembentukan tim pengelola BMN di PPS Bungus dan melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IK 15 antara lain: 1) pelaporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

## Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAKL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator kinerja Nilai IKPA merupakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diperoleh dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

## Target dan Realisasi

Tabel 22 Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 16	Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
93,76	-	-	-	-	-	-	-	-

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk Triwulan I tahun 2024 belum bisa dilaksanakan karena metode perhitungan untuk indikator kinerja ini adalah semesteran, dan akan dilakukan pada triwulan II (Semester 1) dan Triwulan IV (Semester 2).

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran PPS Bungus adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari return SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, dengan komponen layanan dukungan manajemen internal untuk kegiatan layanan perkantoran.

## Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA.

## Target dan Realisasi

Tabel 23 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
86	-	-	-	-	-	-	-	-

Perhitungan dan rekapitulasi capaian untuk indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena metode perhitungan untuk indikator kinerja ini bersifat tahunan dan perhitungan tersebut akan dilaksanakan pada akhir Triwulan IV.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya sinergitas tim pengelola anggaran dan petugas pelaporan online menjadi faktor yang mendukung keberhasilan indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Kegiatan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI dilakukan secara rutin setiap awal bulan. Kegiatan sinkronisasi data capaian output juga dilaksanakan antara keuangan dan tim teknis.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

## Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

## Target dan Realisasi

Tabel 24. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
IK 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera						
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
88,30	89,83	101,73%	88,30	89,83	101,73%	-	-	-

Capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera pada Triwulan I sebesar 89,83 atau 101,73% dari target yang telah ditentukan. Indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator kinerja baru pada Triwulan IV tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama.

## Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera antara lain melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa yang mengisi survey.

## Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan adalah kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan dan KPI.

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 14.949.757.000,-** sesuai dengan DIPA PPS Bungus Tangkap TA. 2024 **Nomor: SP DIPA-032.03.2.531488/2024 tanggal 24 November 2023**, alokasi anggaran tersebut untuk 5 (lima) kegiatan yakni :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan.

Realisasi anggaran sampai Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 5.337.464.262,-** atau sebesar **35,70 %** dari pagu sebesar **Rp. 14.949.757.000,-**.

Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2024

	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi Anggaran Triwulan I 2024	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>		<b>2.037.121.000,-</b>	<b>341.653.961,-</b>	<b>16,77%</b>
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000,-	14.875.855,-	39,15%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.882.200.000,-	322.378.106,-	17,13%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000,-	0,-	0-
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	112.921.000,-	4.400.000,-	3,90%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>12.609.314.000,-</b>	<b>5,036,315,341,-</b>	<b>39,00%</b>
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.912.636.000,-	5,036,315,341,-	39,00%

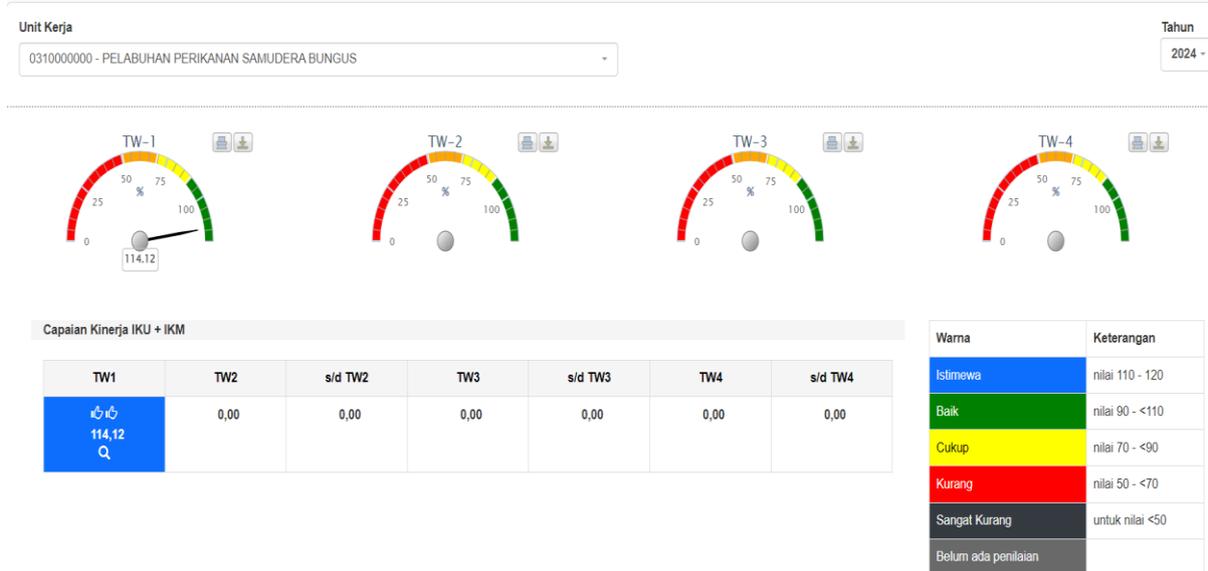


# **BAB 4**

## **PENUTUP**

## 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada Triwulan I tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 114,12 persen.



Gambar 9. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I Tahun 2024, yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), semua indikator kinerja yang ditetapkan telah mencapai nilai lebih dari 100%. Dari 18 indikator kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, terdapat 7 indikator yang pencapaiannya dilaporkan secara triwulanan, sementara 11 indikator lainnya belum dapat dilaporkan karena metode perhitungannya bersifat semesteran dan tahunan.

Selama Triwulan I Tahun 2024, tidak ditemukan permasalahan signifikan dalam upaya pencapaian target. Meskipun demikian, evaluasi dan monitoring tetap dilakukan secara rutin guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pelabuhan. Seluruh pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan amanah organisasi. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berkomitmen untuk terus melakukan upaya berkelanjutan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul dan meningkatkan kinerja secara optimal.

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Dengan penyusunan laporan ini, diharapkan dapat menjadi umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memastikan bahwa setiap kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, didukung oleh perencanaan yang matang, dan dilengkapi dengan dokumen pengadaan yang lengkap dan sesuai standar.

Selain itu, pelabuhan ini terus melakukan berbagai upaya inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan sistem pengawasan internal terus dijalankan guna mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, diharapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan sektor perikanan nasional, meningkatkan kesejahteraan para nelayan, dan mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi dasar perencanaan strategis untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja di masa depan.

## **4.2. STRATEGI PEMECAH MASALAH**

Strategi pemecahan masalah untuk Triwulan I tahun 2024 mencakup pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi yang diadakan setiap bulan. Pada awal tahun, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan yang berfungsi sebagai action plan dan menjadi acuan untuk jadwal kegiatan serta pelaksanaan anggaran. Action plan ini dievaluasi setiap bulan melalui Rapat/Dialog Kinerja Organisasi guna memantau pencapaian hasil dan segera menindaklanjuti jika terdapat masalah atau kendala yang muncul.

Selain evaluasi bulanan, setiap triwulan, bersamaan dengan Rapat/Dialog Kinerja, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus juga mengadakan Rapat Manajemen Risiko. Tujuan dari rapat ini adalah untuk memantau kemungkinan terjadinya risiko dan menangani risiko yang terjadi secara efektif. Dengan adanya kedua rapat ini, pelabuhan dapat memastikan bahwa setiap aspek kinerja dan risiko terpantau dengan baik dan ditangani secara tepat waktu, sehingga operasional pelabuhan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Widodo**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Plt. Direktur Jenderal Perikanan  
Tangkap



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Samudera Bungus



Widodo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

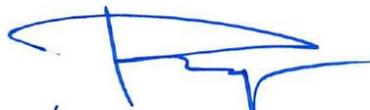
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.283,2
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	6.347
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	81
4.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	57
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	30,10
5.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	412
6.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	30,15
7.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	75
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80

	12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	94
	13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84
	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80
	15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93,76
	17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,30

**Program** : 1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus **Rp2.037.121.000**  
2. Dukungan Manajemen **Rp12.912.636.000**  
**Jumlah Anggaran Tahun 2024** : **Rp14.949.757.000**

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



TB. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus



Widodo